



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAGUS KURNIAWAN
2. Jabatan : KEPALA SUBAUDITORAT
3. NHK : 111341

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 244 m2/150 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/30 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 1600 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 787 m2/200 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.550.000.000
5. Tanah Seluas 397 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 493 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 567.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO/NC11A3C A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOTOR, HONDA V1J02Q32L1 A/T PCX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS INNOVA ZENIX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 28.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 466.784.735



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.012.284.735
III. HUTANG	Rp.	387.605.831
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.624.678.904

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.